



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **HERDYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA UPT**
3. NHK : **768501**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 790.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 316 m2/137 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000
2. Tanah Seluas 472 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 20080 m2 di KAB / KOTA MOROWALI UTARA, LAINNYA Rp. 25.000.000
4. Tanah Seluas 20040 m2 di KAB / KOTA MOROWALI UTARA, LAINNYA Rp. 25.000.000
5. Tanah Seluas 19950 m2 di KAB / KOTA MOROWALI UTARA, LAINNYA Rp. 25.000.000
6. Tanah Seluas 21520 m2 di KAB / KOTA MOROWALI UTARA, LAINNYA Rp. 25.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 144.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 1.5 G M/T/MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, YAMAHA 2DP-RA A/T/ SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 18.000.000**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 50.000**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	952.050.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	952.050.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.